



Rusuh Malioboro Direncanakan

JOGJA-Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyayangkan aksi demo menolak *omnibus law* yang berujung kerusuhan di Gedung DPRD DIY dan mengakibatkan sejumlah kerusakan.

Lugas Subarkah, Hafit Yudi Suprobo, &
Lajeng Padmaratri
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Sultan percaya kelompok tersebut tidak berasal dari DIY, karena masyarakat Jogja tidak memiliki karakter menghancurkan kotanya.
- ▶ Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, menuturkan Pemda DIY baru menginventarisasi kerusakan.

Sultan berencana menindak tegas peristiwa ini dengan menuntut pelaku kerusakan fasilitas publik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurutnya, pelaku kerusuhan bukanlah mahasiswa, buruh atau pelajar, melainkan kelompok tertentu yang memang telah merencanakan serangkaian aksi anarkistis.

"Ada sekelompok orang yang enggak mau pergi, kita tidak kenal itu siapa. Dan itu berlangsung terus sampai sore. Saya yakin *by design*," kata Sultan kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (9/10).

Sultan percaya kelompok tersebut tidak berasal dari DIY, karena masyarakat Jogja tidak memiliki karakter untuk menghancurkan kotanya sendiri. Ia berterima kasih kepada TNI, polisi, dan warga yang mengadang kelompok ini, bahkan sampai berkelahi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga di seputaran Malioboro, Jalan Mataram dan sekitarnya berjaga dengan menggunakan tongkat bambu dan menangkapi massa aksi yang hendak pulang. "Mungkin hanya dengan cara seperti itu kita bisa punya keberanian untuk melawan kepentingan anarkis," katanya.

Aksi rusuh itu, kata dia, bukan bagian dari kepentingan buruh, melainkan direncanakan oleh kelompok yang melakukan hal serupa di banyak daerah lainnya. "Saya ingin dipidana, dituntut. Karena ini *by design*. Supaya tidak main-main," ujarnya.

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, menuturkan Pemda DIY baru menginventarisasi kerusakan. "Ada tiga unsur utama, gedung DPRD, kawasan pedestrian Malioboro, dan Legian," katanya.

▶ Halaman 6

adak Lanjut
Ditanggapi
Untuk Diketahui

Positif Segera Untuk Diketahui

Rusuh Malioboro...

Inventarisasi kerusakan akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (PUSDM) DIY bekerja sama dengan Pemkot Jogja. Setelah diinventarisasi, dihitung pula berapa total kerugiannya dan segera diperbaiki.

Meski demikian, perbaikan oleh Pemda DIY hanya sebatas pada jalur pedestrian Malioboro, karena Gedung DPRD DIY, kata dia, sudah diasturansikan, sementara Legian statusnya milik swasta, ia juga mengungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo sesuai permintaan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY pada Jumat pagi.

"Tentu kami harus respons tuntutan serikat pekerja. Gubernur sudah sanggup menyampaikan kepada Presiden. Setelah ditandatangani dikirimkan, tembusannya Presiden," ungkapnya.

Ada tiga poin penting dalam surat tersebut, yakni penolakan atas disahkannya UU Cipta Kerja, mekanisme penentuan upah minimum berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL), dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, aktivitas DPRD DIY sudah kembali normal sehari setelah diakhiri demo dengan kerusuhan. Kendati masih dihitung, total kerusakan di kompleks DPRD DIY diperkirakan tidak banyak.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan segenap anggota DPRD DIY dan sekretariat sudah beraktivitas normal dan semua agenda kegiatan DPRD tetap berjalan normal. "Anggota di komisi sudah berkegiatan, di kantor sudah menerima audiensi, tamu dan aktivitas lain," ujarnya.

DPRD DIY menyayangkan demo tersebut karena anarkistis dan tidak murni penyampaian aspirasi. Selain merugikan warga DIY, keributan juga merugikan perjuangan pekerja yang menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja secara murni.

"Jadi tidak ada yang diuntungkan dengan [aksi] anarkistis, hanya pihak tidak bertanggung jawab saja yang senang anarkis. Kekerasan seperti kemarin meskipun mungkin sudah lama direncanakan oleh aktor intelektualnya ternyata tidak berefek signifikan dengan warga DIY," katanya.

Bahkan kata dia, Kantor DPRD DIY jadi sasaran saja sehari setelahnya sudah aktivitas normal kembali. Upaya anarkistis, menurutnya, tidak laku di Jogja karena tidak sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Hanya tiga puluh menit sejak demo berakhir warga DIY sudah bergotong-royong membersihkan dan merapikan kompleks DPRD. "Ada sahabat sahabat ojol berbagi, TNC, sukarelawan Jogja, kepolisian,

rekan-rekan TNI dan banyak lagi. Kalau siangnya DPRD penuh pendemo ternyata malamnya penuh sukarelawan yang bergotong-royong," ungkapnya.

DPRD DIY saat ini masih mendata kerusakan dan akan segera memperbaiki, termasuk beberapa warung yang terbakar.

Polresta Jogja menyatakan 95 orang ditangkap terkait dengan demo di DPRD DIY. Sebanyak empat orang di antaranya dikenakan sanksi pidana.

Kasatreskrim Polresta Jogja AKP Rico Sanjaya mengatakan dari 95 orang yang ditangkap paling banyak mahasiswa yakni 36 orang, pelajar (32 orang), wiraswasta (16 orang), dan pengangguran (11 orang).

Empat orang yang dikenakan sanksi pidana diduga berupaya merusak dan membakar pos polisi lalu lintas di gardu listrik belakang Hotel Inna Malioboro.

Untuk mencegah kerusuhan berlanjut, polisi bersama masyarakat mengamankan massa aksi di beberapa tempat, yakni sekitar pospol ABA, sekitar DPRD DIY, sekitar parkir ABA, Tugu, Pasar Sore, Pos Teteg dan Bumijo," jelas Rico di Mapolres Jogja.

Warga yang ditangkap dan akan digiring ke kasus pidana yakni IM, 16, warga Kasihan, Bantul; SB, 17, warga Ngampilan, Jogja; LA, 17, dan CF, 19, keduanya warga Danurejan, Jogja.

"Dari empat orang ini, ada dua orang yang dikenakan pasal 170 yakni pelaku IM dan SB. Sedangkan, dua orang diduga melakukan percobaan pembakaran yakni LA dan CF. Dikarenakan dua orang ini membawa bensin dan berniat untuk membakar pospol tapi ada bapak-bapak mengingatkan jangan dibakar dan akhirnya tidak terlaksana," ungkapnya.

Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh polisi, 91 orang dipulangkan kepada orang tuanya masing-masing. "Kami panggil orang tuanya bagi yang sudah tidak berstatus sebagai pelajar untuk dijemput dan dikembalikan serta dibina. Sedangkan, massa aksi yang masih berstatus sebagai pelajar, kami akan memanggil kepala sekolah untuk datang menjemput siswanya," ungkapnya.

Adapun, pemilik Legian Garden Restaurant yang terbakar di tengah aksi demonstrasi akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda DIY pada Jumat.

Korban berharap kasus ini segera dihentikan oleh Polda DIY dan pelakunya ditangkap.

Pemilik dan tim kuasa hukumnya tiba di Polda DIY sekira pukul 15.00 WIB dan langsung membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKPT) dilanjutkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY.

Kuasa hukum pemilik resto tersebut, Alofi, menuturkan kliennya melaporkan laporan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran restoran berdasarkan pasal 187 dan 406 KUHP. "Kami dari tim kuasa hukum keluarga pemilik Resto Legian di Malioboro melaporkan dugaan tindak pidana pembakaran restoran yang terjadi pada 8 Oktober sekitar pukul 15.00 WIB," ujar Alofi.

Selain melapor, Alofi menyertakan bukti rekaman kamera pengawas saat peristiwa itu terjadi. "Ada seseorang yang tertangkap CCTV, kita sudah laporkan ke Polda juga. Dari CCTV itu ada pelembaran molotov yang mengenai Resto Legian," ujarnya.

Alofi menuturkan dari kondisi joglo di restoran tersebut yang terbakar serta kaca pecah maka kerugian yang dialami kliennya ditaksir mencapai Rp500 juta.

Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan Polda DIY telah menerima laporan pemilik restoran tersebut. "Pelapor tidak menyebutkan pelaku atau tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi menyampaikan bahwa ada sekelompok orang yang melempar molotov dari jalan ke arah kafe tersebut," kata dia.

Direktur LBH Jogja, Yogi Zul Fadhl, menambahkan polisi terkesan menutupi proses hukum. Menurut Yogi, polisi tak memberi akses saat LBH ingin mencari informasi di Polresta Jogja. "Saya tidak tahu ada apa di kepolisian sehingga polisi terkesan menutup-nutupi. Kami melihat polisi tidak terbuka dan menutupi proses pemeriksaan dan itu bertentangan dengan prinsip HAM," ujar Yogi.

PKL Terdampak

Sementara itu, aktivitas pedagang kaki lima (PKL) Malioboro masih belum normal. Kepala UPT Malioboro, Ekwanto, mengaku tidak memberi arahan secara resmi untuk meliburkan PKL. "Prinsipnya kami tidak meliburkan, cuma situasi kondisi teman-teman yang mungkin melihat kondisi dulu yang seperti apa mungkin nanti akan buka," ujar Ekwanto.

Ditegaskan Ekwanto banyak pedagang memilih libur dulu sambil melihat situasi dan kondisi. Ekwanto masih belum mendapat laporan adanya kerusakan dari pihak PKL.

Saat ini proses pendataan kerusakan PKL masih berjalan dilakukan oleh tim infrastruktur. Setidaknya 200 PKL di seputaran DPRD DIY terdampak tidak bisa berjualan. Ketua Paguyuban PKL Malioboro Handayani, Sogi Wartono, mengatakan PKL tak bisa berbuat apa-apa saat keributan terjadi.

Setelah kejadian Sogi datang ke Malioboro untuk berdiskusi dengan pemerintah menyangkut ganti kerugian. (Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro 2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005